



Kementerian PPN/
Bappenas

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Inflasi

Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2021



Jakarta, 28 Oktober 2021





Kementerian PPN/
Bappenas

OUTLINE

- Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Nasional
- Perkembangan Inflasi Daerah
- Isu Strategis Kebijakan Pengendalian Inflasi 2022
- Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (RKP 2022 serta *Tagging Dynamic* Pengendalian Inflasi)
- Sasaran Inflasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024

01 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Nasional

- Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi nasional mulai menunjukkan perbaikan mencapai 7,07% (yoy), dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas masyarakat serta *low based effect* setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi.
- Capaian inflasi rendah berada dibawah batas bawah target target inflasi nasional 2021 yaitu 2,0 – 4,0 % (yoy), dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kembali normal

02 Perkembangan Inflasi Daerah

- Pada triwulan II 2021, terdapat 22 Provinsi dengan realisasi inflasi yang lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 1,33% (yoy), meskipun lebih rendah dari target inflasi pada APBN 2021 sebesar 3,0% (yoy). Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kesenjangan target 2021 di RPJMD dan realisasi inflasi daerah triwulan II 2021.

03 Isu Strategis Kebijakan Pengendalian Inflasi 2022

- Beberapa isu strategis dan permasalahan inflasi tahun 2022, diantaranya: (i) Kesenjangan harga antardaerah; (ii) Panjangnya rantai pasok dan struktur pasar; (iii) Belum kuatnya daya beli dipengaruhi pandemi Covid-19; (iv) Reformasi subsidi energi.
- Diperlukan sinkronisasi antara perencanaan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah

04 Landasan Hukum Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah

- Kementerian PPN/Bappenas sebagai anggota Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) bertugas melakukan koordinasi & sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi sebagaimana amanat Kepres 23 Tahun 2017 tentang TPIN.
- Permen PPN/Kepala Bappenas No.6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Direktorat KNAM menyusun Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi melalui kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif) yang mendukung Prioritas Nasional di pusat dan daerah.

05 Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam RKP 2022

- Inflasi pada tahun 2022 ditargetkan berada dalam kisaran 2,0%-4,0%
- Fokus kebijakan pengendalian inflasi dalam RKP 2022 selaras dengan hasil *High Level Meeting* (HLM) dan *Road Map* Pengendalian Inflasi, meliputi: (i) Penguatan cadangan pangan pemerintah; (ii) Optimalisasi kawasan pangan (*food estate*); (iii) Efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional; (iv) Menguatkan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern; (v) Mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir; (vi) Meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian; (vii) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pengendalian inflasi.

06 Tagging Pengendalian Inflasi dalam KRISNA RKP 2022

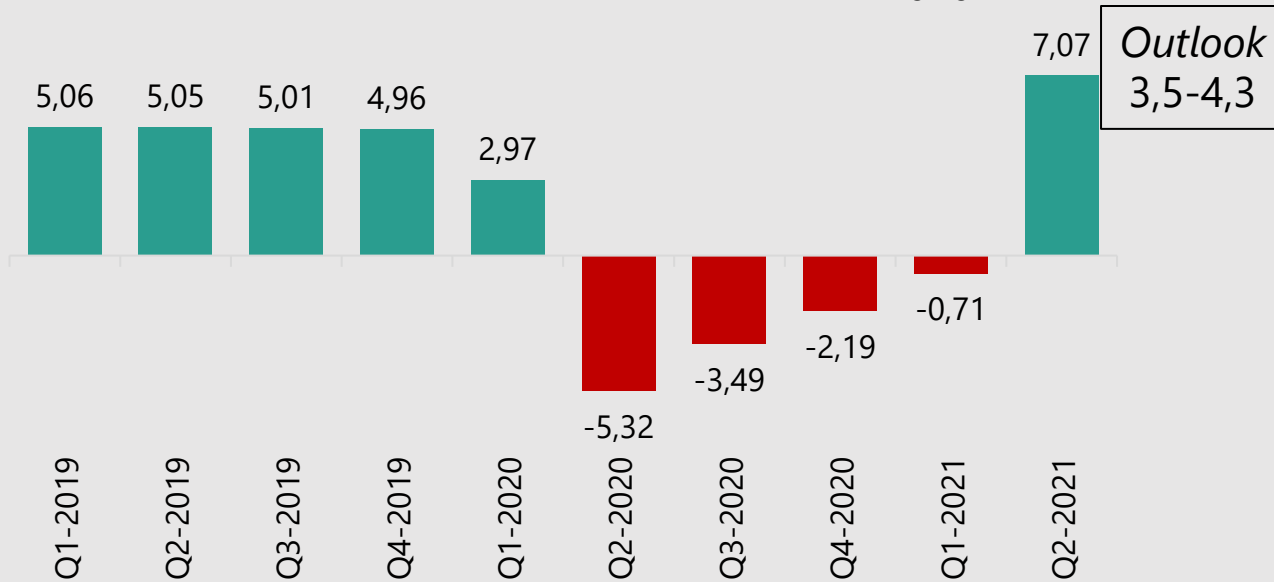
- Instrumen untuk meningkatkan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi salah satunya adalah *Tagging* Pengendalian Inflasi dalam Aplikasi Krisna.
- Kebijakan pengendalian inflasi dalam RKP 2022 mendukung 4 Prioritas Nasional (PN), yaitu PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sain, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

07 Sasaran Inflasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024

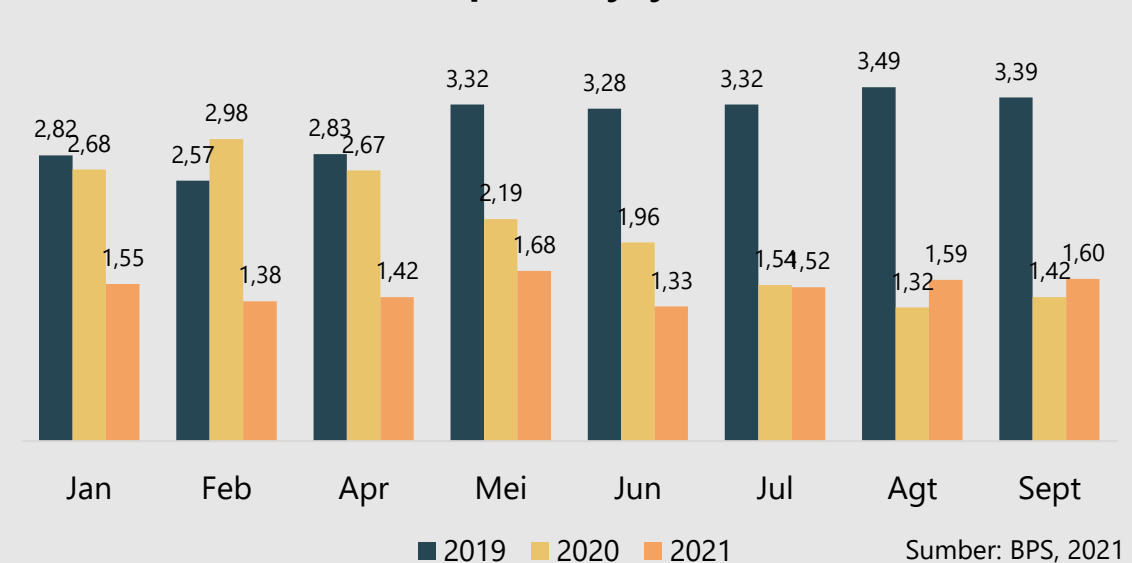
- Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju, stabilitas inflasi dengan tren menurun menjadi prioritas. Pada tahun 2021, inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,0%-4,0% dengan *point estimate* 3,0%.
- Terdapat lima arah kebijakan pengendalian inflasi dalam RPJMN 2020-2024, meliputi: (i) Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis; (ii) Memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah; (iii) Meningkatkan kerjasama antardaerah; (iv) Menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; (v) Meningkatkan kualitas data/statistik.

Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perbaikan mencapai 7,07% (yoy) ditengah capaian inflasi yang rendah berada dibawah batas bawah target inflasi nasional 2021 yaitu 2,0 – 4,0 % (yoy).

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (persen, yoy)



Perkembangan Inflasi Nasional 2019 – 2021 (persen, yoy)



- Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami *rebound* tajam mencapai 7,07% (yoy), dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas masyarakat yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi Pemerintah, investasi dan kinerja ekspor, serta *low based effect* setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi.
- Inflasi pada triwulan II 2021 tercatat 1,33% (yoy) dan hingga September 2021 masih rendah mencapai 1,60 persen (yoy), berada dibawah target inflasi nasional 2021 yaitu 2,0 – 4,0 % (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kembali normal, akibat diberlakukannya kebijakan PPKM untuk menekan penyebaran varian Delta COVID-19.

Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan II 2021, terdapat 22 provinsi dengan realisasi inflasi yang lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 1,33% (yoy), meskipun masih rendah dibandingkan target inflasi pada APBN 2021 sebesar 3,0% (yoy). Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kesenjangan target inflasi 2021 dalam RPJMD serta realisasi inflasi pada triwulan II 2021, akibat tingginya ketidakpastian.

Realisasi Inflasi TW II (% YoY)

| Provinsi | 2021 | | Provinsi | 2021 | |
|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | Target ¹⁾ | Realisasi ²⁾ | | Target | Realisasi ²⁾ |
| DI Aceh | n.a | 2,37 | NTB | 3,0 - 4,0 | 1,91 |
| Sumut | n.a | 1,69 | NTT | 1,85 | 1,35 |
| Sumbar | n.a | 1,74 | Kalbar | 3,47 | 1,15 |
| Riau | n.a | 1,69 | Kalteng | 3,4 | 1,30 |
| Jambi | n.a | 2,43 | Kalsel | n.a | 2,19 |
| Sumsel | 2,0-4,0 | 1,24 | Kaltim | n.a | 1,21 |
| Bengkulu | 3,5-4,07 | 1,89 | Kaltara | n.a | 1,69 |
| Lampung | 3,0-3,5 | 2,34 | Sulut | n.a | 2,36 |
| Babel | 6,17 | 2,54 | Sulteng | 4,5-5,0 | 1,69 |
| Kepri | 5,0 - 7,0 | 1,52 | Sulsel | n.a | 1,49 |
| DKI Jakarta | 3,40 | 1,01 | Sultra | n.a | 2,00 |
| Jabar | 4,0 - 7,0 | 1,46 | Gorontalo | n.a | 2,82 |
| Jateng | 3,0±1 | 1,25 | Sulbar | 2,19 | 3,95 |
| DIY | n.a | 1,43 | Maluku | 3,37 - 4,17 | 1,22 |
| Jatim | n.a | 1,19 | Malut | n.a | 1,18 |
| Banten | n.a | 1,16 | Papua Barat | 3,80 | 3,28 |
| Bali | n.a | 0,58 | Papua | 2,34 | 0,46 |

Keterangan: ¹⁾ Target RPJMD ²⁾ Realisasi TW II 2021

Realisasi inflasi di atas inflasi nasional

Nasional

Sasaran APBN

3%

Realisasi TW II

1,33%

Inflasi Daerah TW II Tahun 2021



Realisasi inflasi daerah lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional

Landasan Hukum Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)



Kepres 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN)



Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas:

- 1 Melakukan **koordinasi & sinkronisasi perencanaan**, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi
- 2 Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan

Permen PPN/Kepala Bappenas No.6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian PPN/Bappenas memiliki tanggungjawab:

➤ Menyusun Perencanaan Kebijakan **Pengendalian Inflasi** untuk Jangka Pendek (RKP) dan Jangka Menengah (RPJMN)

➤➤ **Melalui Pengendalian 4K:**

- Ketersediaan Pasokan
- Keterjangkauan Harga
- Kelancaran distribusi
- Komunikasi efektif



Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Lokasi

Pusat & Daerah

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
No. 3 /Juklak/Sesmen/03/2021
tentang Penandaan (*Tagging*)
Kebijakan Pengendalian Inflasi.

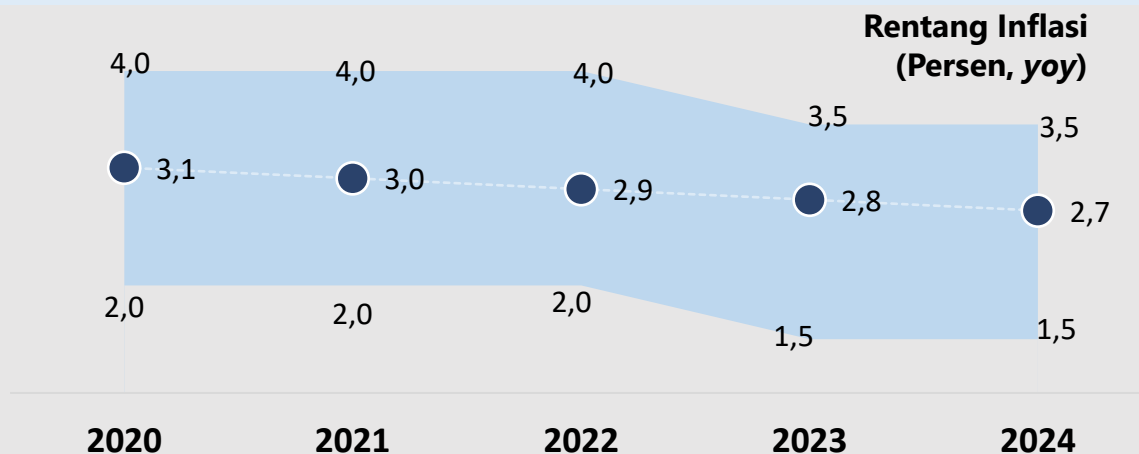
Tagging RO dalam aplikasi
KRISNA (2021)

Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam RPJMN 2020-2024

Stabilitas Inflasi Diperlukan untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi Inflasi Jangka Menengah

Untuk mencapai target pembangunan, stabilitas inflasi dengan tren menurun menjadi prioritas. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

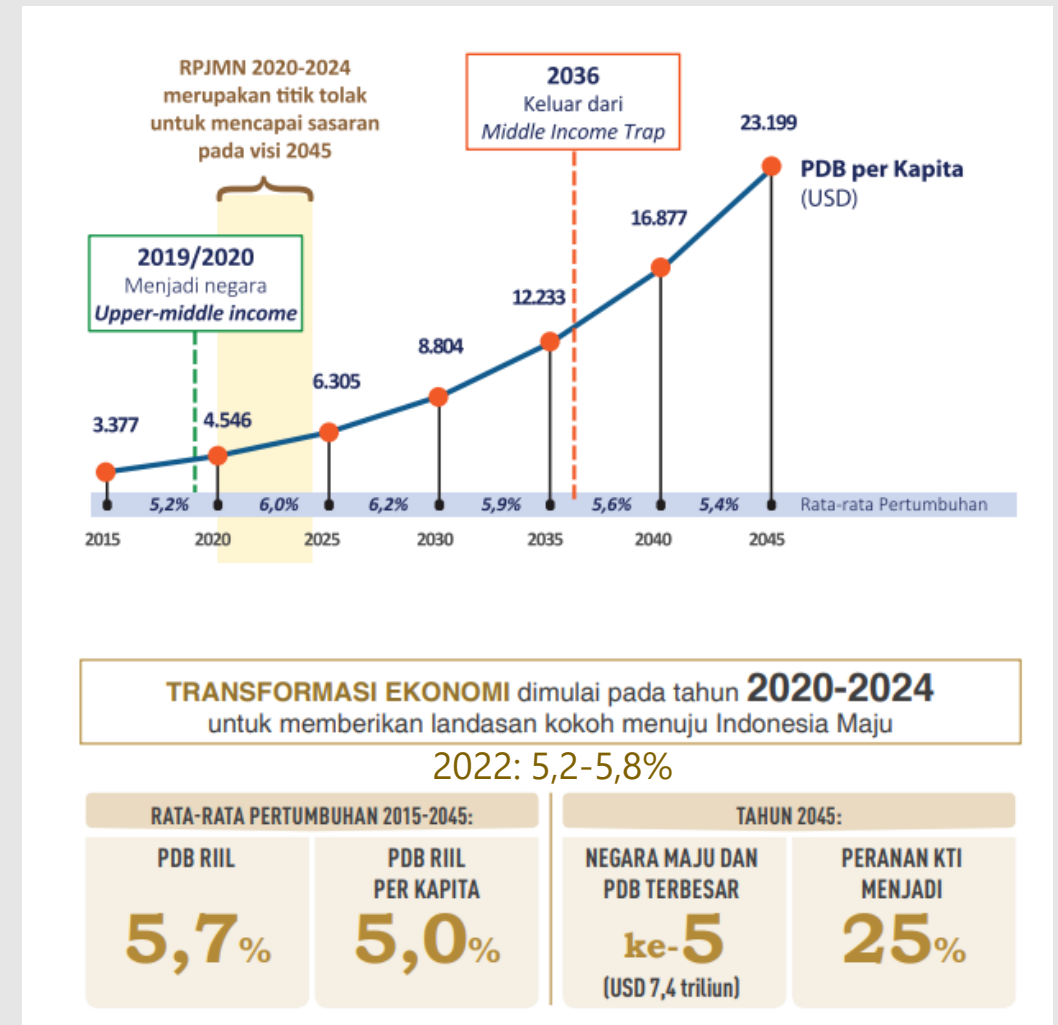


Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi

- Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis
- Memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah
- Meningkatkan kerjasama antardaerah
- Menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan
- Meningkatkan kualitas data/statistik

Sumber: RPJMN 2020-2024, Perpres RKP 2022

Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju



PERMASALAHAN

- Terdapat disparitas harga/inflasi yang cukup besar antardaerah
- Panjangnya rantai perdagangan dan struktur pasar
- Daya beli yang belum optimal dipengaruhi pandemi Covid-19
- Keberlanjutan kebijakan reformasi subsidi energi

ARAH KEBIJAKAN 2022

- 1 **Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas pangan strategis;**
- 2 **Optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra produksi pangan atau *food estate*;**
- 3 **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga;**
- 4 **Mendorong dan menguatkan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk kelancaran distribusi;**
- 5 **Mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir;**
- 6 **Meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian;**
- 7 **Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam semua aspek (pasokan, distribusi, dan komunikasi kebijakan inflasi)**



Perlu Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam RKP 2022

SASARAN INFLASI 2022

»» 2,00-4,00%

KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI



Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas pangan strategis



Mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir



Optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra produksi pangan atau *food estate*



Meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian



Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga



Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam semua aspek (pasokan, distribusi, dan komunikasi kebijakan inflasi)



Mendorong dan menguatkan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk kelancaran distribusi

Instrumen Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi

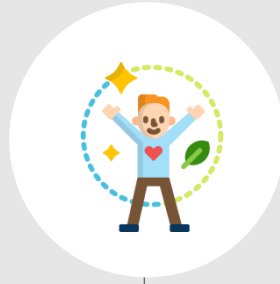
Tagging Pengendalian Inflasi dalam KRISNA RKP 2022

Kebijakan pengendalian inflasi dalam RKP 2022 mendukung 4 Prioritas Nasional (PN), yaitu PN 1, PN 3, PN 4, dan PN 5



PN 1

Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan
Berkeadilan



PN 3

Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing



PN 4

Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan



PN 5

Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

TEMA RKP 2022: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam RKP 2022

Hasil *Tagging* Pengendalian Inflasi dalam KRISNA RKP 2022

Keterjangkauan Harga

Ketersediaan Pasokan

Kelancaran Distribusi

Komunikasi Efektif



PN 1

Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan

PN 3

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing

1. Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. **(Kementan)**
2. Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. **(Kemendag)**

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Padi Biofortifikasi). **(Kementan)**
2. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (Bawang Merah, Aneka Cabai, Bawang Putih). **(Kementan)**
3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak. **(Kementan)**
4. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan **(Kementan)**
5. Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan (*Chest freezer*). **(KKP)**
6. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan. **(KKP)**
7. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. **(KKP)**
8. Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. **(Kemendag)**

1. Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan **(Kementan)**
2. Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan **(KKP)**
3. Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro. **(Kemenkop UKM)**
4. Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM. **(Kemenkop UKM)**
5. Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM. **(Kemenkop UKM)**
6. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan. **(Kemendag)**

1. Koordinasi Instansi dan Kunker Barang Penting; dan Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian, Peternakan, Holtikultura, Industri, dan Perikanan. **(Kemendag)**

1. Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran. **(Kemen ESDM)**
2. Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. **(Kemensos)**
3. Penyelenggaraan Program

1. Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran. **(Kemen ESDM)**

Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam RKP 2022

Hasil *Tagging* Pengendalian Inflasi dalam KRISNA RKP 2022

Keterjangkauan Harga

Ketersediaan Pasokan

Kelancaran Distribusi

Komunikasi Efektif



PN 4

Revolusi Mental
dan Pembangunan
Kebudayaan



PN 5

Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan. **(KemenPUPR)**
2. Pengelolaan Ketenagalistrikan (Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran). **(Kemen ESDM)**
3. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BBM 1 harga). **(Kemen ESDM)**

1. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni. **(KemenPUPR)**

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Diantaranya pada kawasan: Trans Papua-Merauke-Sorong (MP); Kawasan Prioritas, dan Trans pada 18 pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP). **(KemenPUPR)**
2. Pelayanan Transportasi Udara (Angkutan udara perintis, Angkutan BBM angkutan udara perintis, subsidi operasi angkutan udara kargo (MP)). **(Kemenhub)**
3. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat (Pembangunan: Terminal Barang International, Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan, Dermaga). **(Kemenhub)**
4. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Subsidi, peningkatan jalur KA). **(Kemenhub)**
5. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Peningkatan dan restitusi jalur

1. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Kecintaan Penggunaan Produk Dalam Negeri. **(Kemendag)**

TERIMA KASIH